PROSPEK EKONOMI 2026 DAN KEBERLANJUTAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU:

MENJAGA DAYA SAING INDUSTRI DAN EKONOMI RAKYAT JAWA TIMUR

GAPERO Surabaya

HJ. SULAMI - KETUA GAPEROSU









Hotel Kampi Surabaya, 27 Oktober 2026

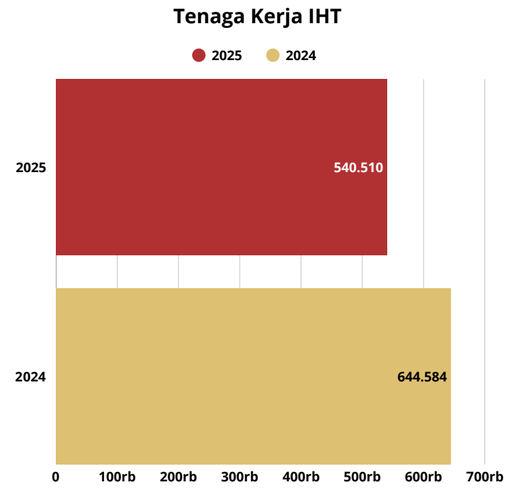
Pertumbuhan Harus Berkualitas dan Inklusif

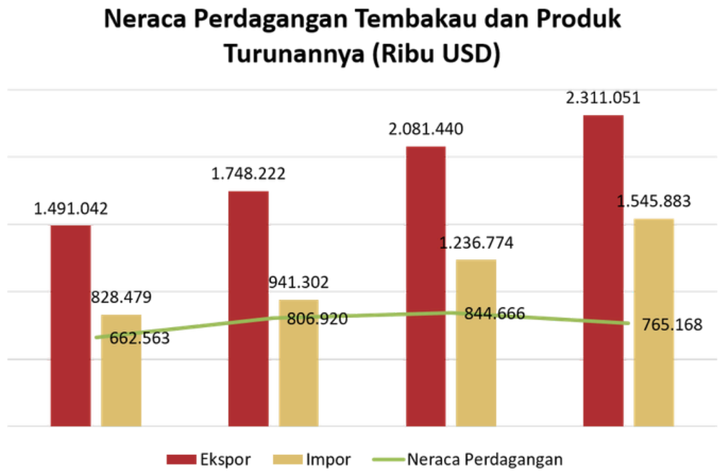
- Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada triwulan II 2026, sedangkan ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% (BPS, 2026).
- Jawa Timur memiliki modal ekonomi berupa basis industri pengolahan, perdagangan, pertanian, logistik, dan pasar domestik yang besar.
- Ketidakpastian geopolitik dan perdagangan global berpotensi memengaruhi nilai tukar, biaya bahan baku, energi, logistik, serta keputusan investasi.
- Pertumbuhan perlu diukur pula dari kemampuan industri mempertahankan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

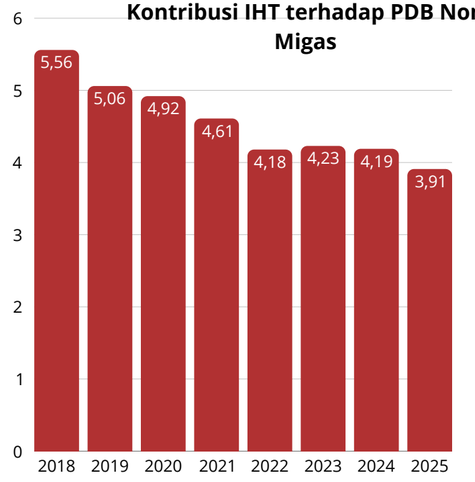


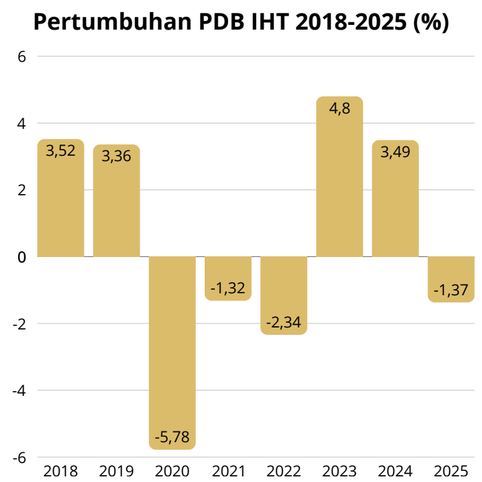
GAPERO
Surabaya

Overview IHT









1. Penerimaan CHT sepanjang tahun 2025 mencapai Rp221,7 T atau 90,8% dari target APBN. Penerimaan ini terkontraksi 2,1% dibandingkan pada penutup tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya produksi hasil tembakau Nasional yang mencapai 3,0% (yoy).
2. Menurut data Sakernas, jumlah tenaga kerja IHT pada tahun 2025 turun sekitar 104 ribu pekerja (16%) dibanding tahun 2024
3. Surplus neraca perdagangan menurun menjadi 765 juta (2025) akibat kenaikan impor
4. Kontribusi IHT terhadap PBD non migas menurun menjadi 3,91% pada tahun 2025.
5. Pertumbuhan sektor IHT mengalami pembalikan yang siginifikan, dari tumbuh positif sebesar 3,49% pada tahun 2024 menjadi terkontraksi sebsar 1,37% pada tahun 2025.

1.728
Unit usaha IHT di Jawa Timur dari Hulu hingga hilir

±287 ribu
Pekerja yang bergantung pada IHT di Jawa Timur

±60%
Perkiraan kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai hasil tembakau nasional

22,8%
Perkiraan kontribusi IHT terhadap total output industri pengolahan Jatim

GAPERO
Surabaya

Realisasi & Target APBN 2026

s.d September 2026

REALISASI & TARGET APBN 2026

CUKAI
Rp167,68 T
(68,85%)
Target: Rp243,53 T

Hasil Tembakau
Rp159,49 T
(70,65%)
Target:Rp225,70 T

Etil Alkohol
Rp141,36 M
(105,72%)
Target: Rp133,70M

MMEA
Rp7,86 T
(78,07%)
Target: Rp10,06 T

MBDK
Rp0
(-)
Target: Rp7,6 T

REALISASI & TARGET LAPSEM 2026

CUKAI
Rp167,68 T
(71,54%)
Target: Rp234,40 T

Hasil Tembakau
Rp159,49 T
(71,45%)
Target:Rp223.20 T

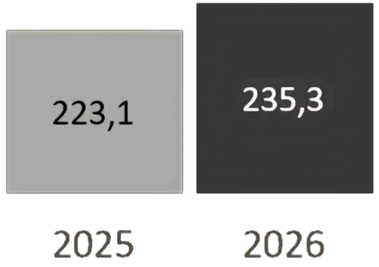
Etil Alkohol
Rp141,36 M
(70,68%)
Target:Rp200,00 M

MMEA
Rp7,86 T
(73.43%)
Target:Rp10,70 T

MBDK
Rp0
(-)
Target: Rp 0

GAPERO Surabaya

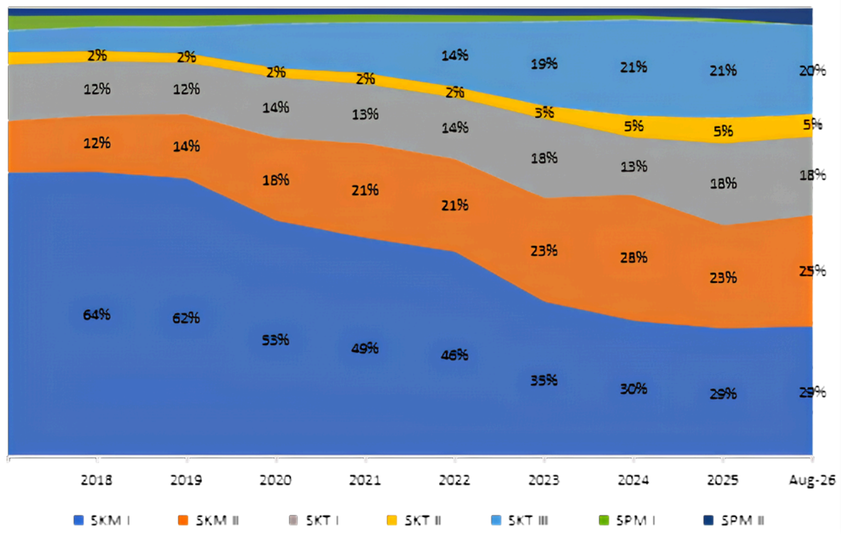
Situasi IHT

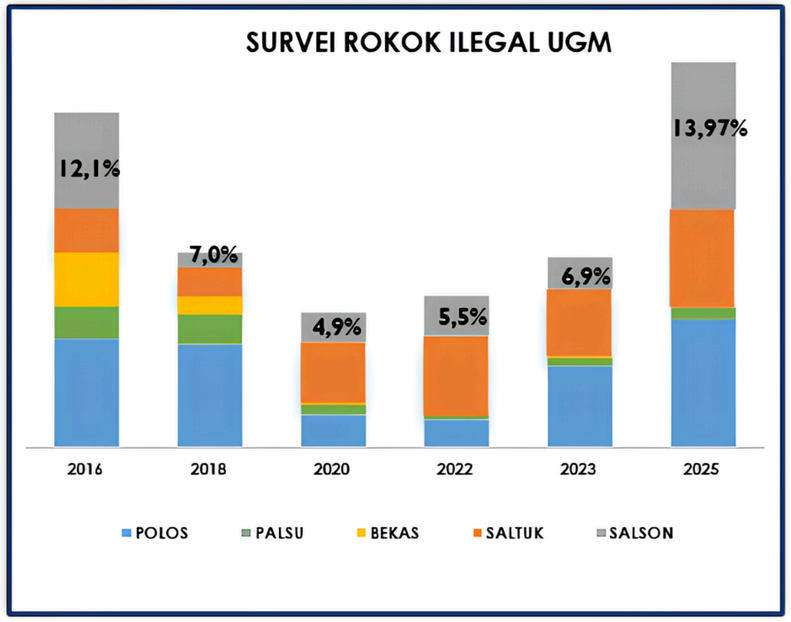


- Produksi September: **27,2 M btg**
- Produksi total 2026: **235,3 M btg**
- Produksi **naik 5,5%** YoY

M Btg	2025	2026	% YoY
SKM	116,0	125,6	8,2%
SKT	99,5	101,2	1,7%
SPM	7,5	8,5	12,7%

***Market Share* Produksi**





KONDISI SAAT INI

Terjadi fenomena downtrading dari tahun 2020 penyebab:

- ➢ Gap tarif yang semakin melebar
- ➢ Rokok illegal trendnya meningkat sebagai dampak dari harga rokok yang mahal

Kebijakan yang sudah dilakukan:

- ✓ Tahun 2025 tidak ada kenaikan tarif sebagai upaya perbaikan industri dilanjutkan di tahun 2026
- ✓ Dampak dari kebijakan ini menunjukan secara total produksi tumbuh 5,6% dibandingkan tahun 2025, namun masih belum optimal mengingat proyeksi penerimaan Cukai HT masih jauh dari target yang harus dicapai

GAPERO
Surabaya

Kondisi IHT

Tekanan Regulasi dan Tantangan Daya Saing







1. TEKANAN REGULASI KESEHATAN

PP No. 28 Tahun 2024 memuat ketentuan terkait pengendalian produk tembakau, termasuk standardisasi kemasan, iklan, promosi, penjualan, dan zat adiktif. Ketentuan yang menjadi perhatian industri meliputi pembatasan iklan dalam radius 500 meter, penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta standardisasi kemasan.

2. RENCANA PEMBATASAN TAR DAN NIKOTIN

Pemerintah selanjutnya akan melakukan pembatasan tar dan nikotin pada produk hasil tembakau. Jika pembatasan tidak memperhatikan karakteristik tembakau di indonesia yang memiliki kadar nikotin tinggi, maka bisa dipastikan tembakau petani akan menjadi sulit terserap.

3. RENCANA PELARANGAN BAHAN TAMBAHAN LAIN

Rencana kebijakan terkait bahan tambahan lain, termasuk mentol, perisa, dan cooling agent, perlu dikaji berdasarkan bukti ilmiah yang relevan, karakteristik paparan, proporsionalitas pembatasan, dampak ekonomi, serta kepastian hukum.

4. PENGAWASAN DAN PERSAINGAN USAHA

Peredaran rokokk ilegal yang tidak terbendung mulai menghancurkan IHT.

GAPERO
Surabaya

Harapan

1. **Kepastian kebijakan fiskal 2026**. Mendorong tidak adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan HJE pada 2026, atau setidaknya moratorium yang memberi ruang bagi pemulihan pasar dan evaluasi dampak kebijakan. Kebijakan perlu mempertimbangkan struktur industri dan karakteristik masing-masing golongan.
2. **Regulasi berbasis bukti dan kajian dampak**. Meminta keterlibatan industri, akademisi, petani, pekerja, dan pemerintah daerah dalam evaluasi kebijakan terkait bahan tambahan, perisa, kemasan, iklan, serta pembatasan penjualan. Kajian perlu mencakup bukti ilmiah, dampak sosial-ekonomi, risiko pasar ilegal, dan kelayakan implementasi.
3. **Perlindungan tenaga kerja dan ekosistem lokal.** Memastikan kebijakan mempertimbangkan karakter padat karya, keberlangsungan industri kecil dan menengah, penyerapan hasil pertanian, serta keberlanjutan usaha pendukung.
4. **Penegakan hukum yang adil terhadap rokok ilegal.** Memperkuat pengawasan distribusi dan penindakan terhadap pelanggaran, disertai pembinaan bagi pelaku yang dapat diarahkan kembali ke jalur legal sesuai ketentuan. Penegakan harus konsisten terhadap seluruh pelaku.
5. **Dialog kebijakan yang terstruktur.** Membuka ruang konsultasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kadin, Gapero, asosiasi petani, pekerja, dan pelaku usaha agar keputusan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

GAPERO
Surabaya

Gapero Surabaya

THANK YOU

REGARDS

Hj. Sulami - **Ketua**
Gapero Surabaya